



Budaya Kekerasan dan Pendidikan Multikultural di Sekolah: Sebuah Telaah Kritis

Anju Nofarof Hasudungan*

SMAN 1 Rupert, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the culture of violence and multicultural education in schools which are critically examined. That, violence is not justified in life at school. Especially if violence is justified because of the differences between students in terms of religion, ethnicity, race and class. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection is done through observation, document analysis and literature study. In Indonesia, the implementation of the multicultural education paradigm is implicit in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System it is stated that education is carried out in a democratic, fair, non-discriminatory manner, upholding human rights, religious values, cultural values and national pluralism; Education is organized as a systemic unit with an open and multi-meaning system. This means that schools and history learning can play a role in the development of multicultural education as an effort to prevent violence in schools.

ARTICLE HISTORY

Submitted 05 Mei 2022
Revised 15 Mei 2022
Accepted 27 Mei 2022

KEYWORDS

Pendidikan Multikultural; Budaya Kekerasan; Sekolah; Tujuan Pendidikan Nasional

CITATION (APA 6th Edition)

Hasudungan, A. N . (2022). Budaya Kekerasan dan Pendidikan Multikultural di Sekolah: Sebuah Telaah Kritis. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian*. 10(1), 30-41.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

anjuhasudungan81@guru.sma.belajar.id

PENDAHULUAN

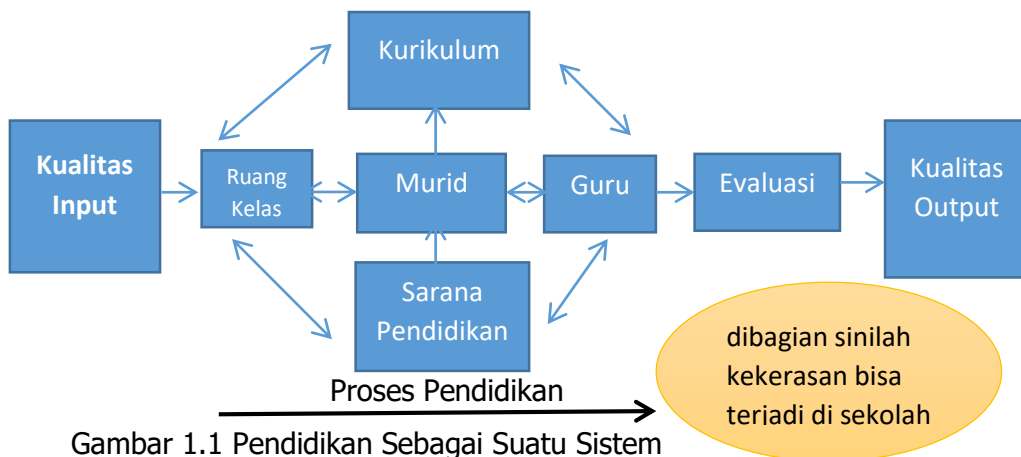
Asumsi atau anggapan budaya kekerasan sebagai dampak kegagalan pendidikan nilai sekolah harus dibuktikan dengan hasil penelitian. Kita harus kritisi asumsi ini. Ada dua hal yang harus dikritisi dari anggapan Budaya–kekerasan dianggap sebagai dampak dari kegagalan pendidikan nilai sekolah, yakni sebagai berikut: 1) Apakah bangsa Indonesia menciptakan budaya kekerasan? Apakah istilah budaya kekerasan memang ada/dibenarkan? Bukankah lebih tepat bentuk kriminalitas biasa yang bisa terjadi di negara manapun di dunia ini. Terlalu general jika dianggap sebagai budaya dalam arti sebenarnya. Karena budaya itu sendiri ialah: secara harfiah budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi diartikan sebagai akal dan perasaan untuk menimbang hal yang baik dan yang buruk, dan Daya berarti kemampuan untuk bertindak (Mahfudzi, 2020). Jadi arti dari budaya adalah: Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Hastuti & Supriyadi, 2020).

Artinya masyarakat telah memfilter kekerasan untuk tidak masuk menjadi bagian dari sistem budaya; 2) Apakah persepsi masyarakat menganggap bahwa budaya kekerasan dianggap sebagai kegagalan pendidikan nilai sekolah adalah suatu kebenaran atau hanya emosional sesaat akibat pemberitaan media mengenai kasus kekerasan di sekolah. Jika asumsi ini muncul ke permukaan karena respon berlebihan masyarakat terhadap berita-berita kekerasan di media mengenai kekerasan di lingkungan sekolah seperti kekerasan kepada murid, guru atau sesama murid dan bentuk kekerasan lainnya.



Menyikapi hal tersebut, penulis beranggapan bahwa tidak benar adanya budaya kekerasan di sekolah. Jikapun terjadi kekerasan di sekolah itu karena ada subsistem yang bermasalah akibat pengaruh negatif dari luar. dan jika sekolah mampu mengantisipasinya bahkan mencegahnya pengaruh negatif masuk ke sekolah maka kekerasan itu tidak ada di sekolah.

Jika kekerasan dianggap sebagai sebagai dampak dari kegagalan pendidikan nilai sekolah ? Maka bisa jadi demikian. Untuk itulah sekolah atau pemerintah harus menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu temuan dari Pelu, Dardiri, & Zuchdi (2016) bahwa sebenarnya terdapat modal sosial dan budaya dalam pembentukan budi pekerti di sekolah (studi kasus SMP Muhammadiyah 5 dan SMP Kasatriyan 1 Surakarta).



Gambar 1.1 Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedua sekolah tersebut mampu memanfaatkan dan menggunakan modal sosial dan budaya sebagai pembentukan pendidikan budi pekerti (karakter), meliputi hubungan saling percaya (*trust*), norma (*norm*), jaringan (*network*), dan keterkaitan (*linkage*). Dan pendidikan budi pekerti diajarkan melalui proses pembelajaran di kelas, pembiasaan, keteladanan, dan pengondisian lingkungan.

Masing-masing sekolah di daerah tentunya mempunyai *local wisdom* sendiri yang diambil dari budaya (norma) dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat termasuk didalamnya pendidikan. Jika modal sosial dan modal budaya diintegrasikan dan diimplementasikan dalam pendidikan di sekolah maka kekerasan yang timbul mampu disterilkan dari sekolah karena adanya filter dan *human body* dari modal sosial dan modal budaya yang diambil dari *local wisdom*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya kekerasan dan pendidikan Multikultural di Sekolah yang ditelaah secara kritis.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari studi deskriptif kualitatif adalah ringkasan yang komprehensif, dalam istilah sehari-hari, dari peristiwa tertentu yang dialami oleh individu atau kelompok individu, dalam konteks ini adalah budaya kekerasan dan pendidikan multikultural di sekolah (Creswell & Creswell, 2018). Studi deskriptif kualitatif adalah yang paling "teoretis" dari semua pendekatan kualitatif untuk penelitian. Selain itu, studi deskriptif

kualitatif adalah studi yang paling sedikit terbebani, dibandingkan dengan pendekatan kualitatif lainnya, dengan komitmen teoretis atau filosofis yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, fenomenologi, grounded theory, dan etnografi didasarkan pada kerangka metodologis spesifik yang muncul dari tradisi disipliner tertentu (Lukitaningsih, Hasudungan, & Nababan, 2022). Sebagai perbandingan, studi deskriptif kualitatif cenderung menarik dari penyelidikan naturalistik, yang menyatakan komitmen untuk mempelajari sesuatu dalam keadaan alami sejauh itu mungkin dalam konteks arena penelitian. Dengan demikian, tidak ada pra-seleksi variabel studi, tidak ada manipulasi variabel, dan tidak ada komitmen sebelumnya untuk satu pandangan teoretis dari fenomena budaya kekerasan dan pendidikan multikultural di sekolah.

Meskipun studi deskriptif kualitatif berbeda dari desain penelitian kualitatif lainnya, studi deskriptif kualitatif mungkin memiliki beberapa nada dari pendekatan lain. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif mungkin memiliki nuansa grounded theory, karena menggunakan analisis komparatif konstan ketika memeriksa data. Namun, penelitian deskriptif kualitatif bukanlah grounded theory, karena tidak menghasilkan teori dari data yang dihasilkan (Prayogi, 2021). Oleh karena itu, dalam hal pengumpulan data dilakukan dengan observasi, analisis dokumen dan studi pustaka (Sugiyono, 2017). Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif dari Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

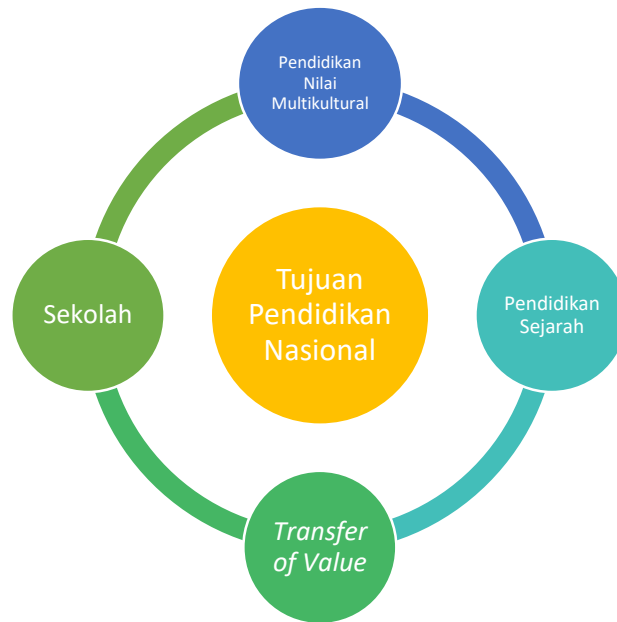
PEMBAHASAN

Bagaimana Seharusnya Pendidikan Nilai Multikultural Diajarkan dalam Pendidikan Sejarah ?

Kurikulum 2013 dibentuk sebagai sarana pemabangunan pendidikan karakter (*Character Building*). Selanjutnya telah teridentifikasi 18 nilai yaitu : (1) **Religius**, (2) Jujur, (3) **Toleransi**, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) **Demokratis**, (9) Rasa ingin tahu, (10) **Semangat kebangsaan**, (11) **Cinta tanah air**, (12) Menghargai prestasi, (13) **Bersahabat/komunikatif**, (14) **Cinta damai**, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) **Peduli sosial**, (18) Tanggung jawab (Baginda, 2018). Sedangkan, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Di dalam pendidikan sejarah, nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Disaat yang sama, 18 nilai karakter tersebut dapat digali dari pengalaman bangsa Indonesia seperti halnya Pancasila. Pengalaman bangsa Indonesia tersebut diantaranya ialah peristiwa sejarah.

Tujuan pengajaran bukan sekedar *transfer of knowledge*, tetapi juga *transfer of value*, bukan sekedar membelajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Pengajaran sejarah selain bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, juga mempunyai fungsi *didaktis*. Fungsi didaktis pengajaran sejarah telah dinyatakan secara implisit dan eksplisit, seperti yang dinyatakan Sartono Kartodirdjo (dalam Supardi, 2006) "*bahwa maksud pengajaran sejarah adalah agar generasi muda yang berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyang-nya*".



Gambar 1.2. Implementasi Pendidikan Nilai Multikultural dalam Pendidikan Sejarah

Sejarah berperan penting dalam pendidikan multikultural (Pujiartati & Sariyatun, 2017; Wirasari & Bain, 2018; Zamroni et al., 2021). Pendidikan sejarah berperan penting dalam internalisasi dan pembangunan kesadaran sejarah. Pendidikan sejarah mampu menjadikan berbagai perbedaan sejarah masa lampau sebagai suatu pelajaran untuk masa depan lebih baik (Rulianto, 2019). Dalam kenyataannya sudahkah pembelajaran sejarah dalam sistem pendidikan selama ini telah mengembangkan pendidikan multikultural secara efektif? Sudahkah pengajaran sejarah memunculkan berbagai fakta keberagaman masa lalu hinggamasa kini, yang mampu menumbuhkan kesadaran siswa akan keberagaman tersebut?

Dalam implementasi pembelajaran di kelas, guru belum berhasil mengembangkan suasana pembelajaran sejarah yang variatif (Saiman, 2011). Mereka selalu mengedepankan sistem pembelajaran *ekspositoris* yang menonjolkan pengembangan domain kognitif (Hasudungan, 2021). Tidaklah mengherankan kalau kemudian banyak siswa *apatis* dan *skeptis* pada mata pelajaran sejarah. Asmara (2019) mengatakan, bahwa pengajaran sejarah masih berorientasi pada penyajian fakta, belum berorientasi pada upaya penghayatan dan kesadaran sejarah.

Setiap bagian wilayah Indonesia, mempunyai banyak perbedaan sejarah dan kebudayaan (Mahdayeni, Alhaddad, & Saleh, 2019). Sangat naif apabila dibuat penyeragaman sejarah dan budaya tersebut melalui kurikulum nasional. Hendaknya perbedaan yang terjadi, maupun pertentangan yang pernah dialami antara sebagian daerah tidak perlu ditonjolkan tetapi juga jangan ditutup-tutupi, dengan lebih mengedepankan deferensiasi yang sifatnya menuju akomodasi. Dengan berkaca pada sejarah, *Analysis of the impact factor of the historical heritage of the socio-economic situation in the municipalities of the region shows that its differentiation is largely determined by the composition of ethnic and cultural groups of municipalities* (Panasyuk, Pudovik, Malganova, & Butov, 2015). Pengungkapan berbagai sisi kehidupan atau sejarah dalam lokalitas, akan semakin menggugah kesadaran betapa masing-masing

budaya memiliki keanekaragaman nilai-nilai yang luhur. Dengan berkaca pada sejarah, Analisis faktor dampak dari warisan sejarah dari situasi sosial-ekonomi di kota daerah menunjukkan bahwa diferensiasi sangat ditentukan oleh komposisi kelompok etnis dan budaya kota.

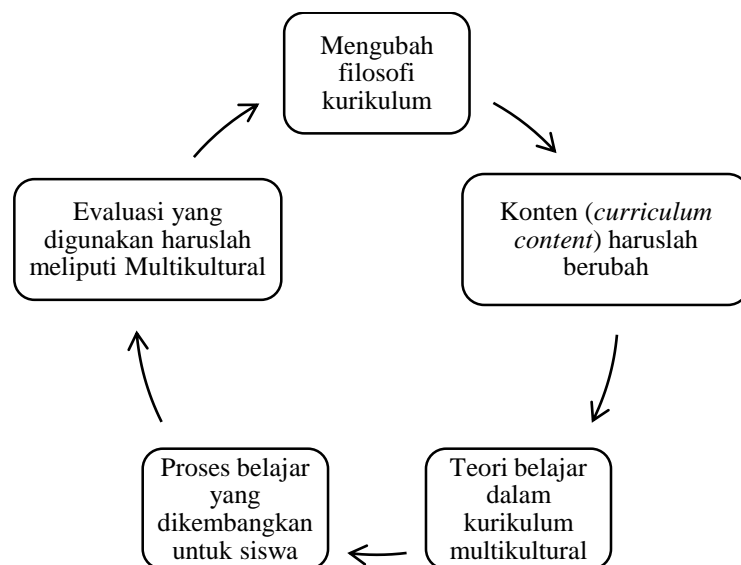
Maka dalam hal ini pembelajaran sejarah harusnya dapat menjadi bagian penting dalam pendidikan multikultural. Melalui pembelajaran sejarah hal yang penting dapat dilakukan adalah:

1. Siswa dapat ditingkatkan sikap nasionalismenya melalui refleksi perjuangan para pendahulu kita yang berjuang menyatukan bangsa dan mempertahankannya agar tetap menjadi satu kesatuan melalui pembelajaran sejarah
2. Siswa dapat diajarkan bertoleransi antar suku melalui pembelajaran sejarah yang mengungkapkan bahwa kita umumnya bangsa Indonesia adalah pendatang, istilah pribumi hanya menjelaskan kelompok yang mana yang lebih dulu datang ke Indonesia bukan sebagai penduduk asli. Hal ini penting agar di dalam mindset siswa tidak tertanam bahwa mereka sebagai kelompok yang harus mempertahankan bangsanya dari ancaman suku lain yang dianggap akan bukan bagian dari bangsa Indonesia. Siswa harus mengerti bahwa seluruh kelompok yang ada sudah mendiami wilayah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, setiap kelompok ini ikut berjuang melalui caranya masing-masing menjadi suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita tempati saat ini.
3. Melalui pembelajaran sejarah siswa diajarkan untuk melihat fenomena bahwa dalam proses terbentuknya Negara Indonesia, ada pihak-pihak yang mengalah terhadap yang lain demi terbentuknya Negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembentukan dasar negara kita dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Sato, 2010).
4. Proses identifikasi terhadap tokoh-tokoh perjuangan bangsa menjadi penting, melalui pembelajaran sejarah dapat di jabarkan bahwa umumnya para pendiri bangsa ini adalah orang yang plural bukan fanatik. Mereka saling bertukar ilmu tentang agama mereka, mencari sebuah konsensus yang tidak diskriminatif.
5. Melalui pembelajaran sejarah, siswa diajak untuk melihat kembali bahwa banyak sekali konflik sosial antar golongan di masa lalu yang bersumber dari ketidakharmonisan antar suku dan agama di Indonesia. Setiap peristiwa ini memakan korban yang tidak sedikit, kerugian material yang ditimbulkan juga begitu luar biasa jumlahnya, konflik-konflik ini menimbulkan beban psikis bagi orang yang tinggalkan bahkan sudah menjadikan beberapa dari kelompok yang ada di Indonesia mendapatkan perlakuan yang diskriminatif hingga hari ini (Hasudungan, 2020). Tentunya pemahaman yang harus ditekankan pada siswa melauai pembelajaran sejarah tadi bahwa di masa depan peristiwa ini tidak diharapkan terulang kembali.

Pengembangan Kurikulum di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Multikultural

Pengembangan Kurikulum (*curriculum development*) merupakan istilah komprehensif di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan penilaian (Dhanapala, 2021). Pengembangan filosofi kurikulum yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut (Matsuroh, 2010; Suniti, 2014): 1) Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan; 2) Teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda; 3) Teori belajar dalam kurikulum multikultural yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia; 4) Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial.

Artinya, proses belajar yang mengandalkan siswa belajar secara individualistik dan bersaing secara kompetitif-individualistik harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antar-individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik; 5) Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan *alternative assessment* (portofolio, catatan observasi, wawancara) dapat digunakan.



Gambar 1.3: Pengembangan kurikulum

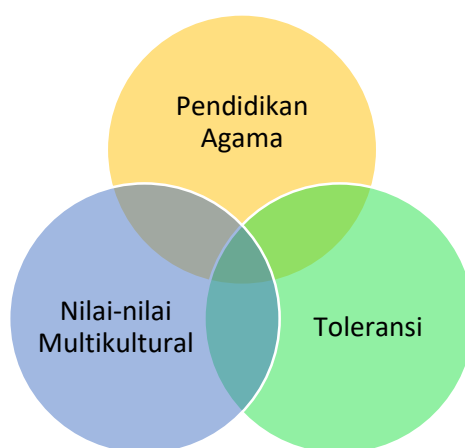
Kita bisa memilih Model Pengembangan Kurikulum yang mana yang akan gunakan dalam pengembangan kurikulum dengan pendekatan multicultural yakni, Model Ralph Tyler, Zais, Beauchamp, Hilda Taba, dan Seller dan Miller. Pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum haruslah menggabungkan pengertian yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantoro (1936, 1945, 1946), Webb (1990), Oliver dan Howley (1992), Print (1993), Delpit (1997), dan ahlinya seperti Banks (1993), Andersen dan Cusher (1994), Burnet (1994).

Pendidikan multikultural untuk kurikulum nasional diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi dan tujuan, komponen kurikulum, dan lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan (Rustam, 2013). Pendidikan multikultural diajarkan melalui proses pembelajaran di kelas, pembiasaan, spontan, pengondisian lingkungan, dan keteladanan. Untuk pembiasaan dan keteladanan dilakukan di lingkungan sekolah dengan melibatkan semua warga sekolah. Proses pembelajaran pendidikan multikultural dilaksanakan oleh guru BP yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan multikultural mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Supriatin & Nasution, 2017). Meskipun demikian, semua warga sekolah diwajibkan mendukung pendidikan multikultural melalui pembiasaan dan keteladanan yang diimplementasikan dalam berbagi rutinitas dan aktivitas kegiatan yang bersifat penanaman nilai multikultural kepada siswa (Zulqarnain, 2017).

Inti dari aktivitas ini adalah pengambilan keputusan tentang apa, mengapa dan bagaimana komponen-komponen kurikulum akan dibuat. Menurut penulis kurikulum 2013 saat ini tidak semata-mata hanya menerapkan pendekatan saintifik saja tetapi juga dapat menerapkan pendekatan multikultural secara bersamaan.

Bagaimana Seharusnya Pendidikan Multikulturalisme Diimplementasikan dalam Pendidikan?

Di Indonesia implementasi paradigma pendidikan multikultural setidaknya menjadi salah satu perhatian, karena secara implisit dalam UU No. 20/ tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multimakna (Hadi, 2016).



Gambar 1.4: Integrasi Nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama

Pendidikan multikultural di Indonesia dapat diimplementasikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal (Widiatmaka & Purwoko, 2017). Pada pendidikan formal tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi wacana pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan cara memasukan muatan wawasan multikultural pada materi kurikulum terkait seperti agama, pendidikan kewargaan/*civic education*, sosiologi atau materi lain yang relevan. Disamping itu dapat diimplementasikan melalui pendekatan, metode dan model pembelajaran seperti diskusi, tugas kelompok, dan *Contextual Teaching and Learning*. Pada pendidikan non formal muatan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan menanamkan nilai-nilai multikultural pada pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan secara mandiri. Wawasan multikultural dapat diberikan kepada anak dari hal yang sederhana seperti menyadari perbedaan jenis kelamin dan gender, pengetahuan tentang bermacam adat istiadat, toleransi antara sesama anggota keluarga dan teman sepermainan dan lain-lain.

Sementara pada pendidikan nonformal wawasan pendidikan multicultural dapat diimplementasikan oleh lembaga pelatihan, kegiatan belajar masyarakat, kelompok belajar dan majlis taklim melalui pelatihan-pelatihan, pengkajian-pengkajian dan pengajian-pengajian yang berwawasan multikultural, tidak fanatik buta pada satu paham/pengetahuan, tidak memupuk nilai-nilai primordialisme dan mono etnik. Sebaliknya pendidikan dilaksanakan dengan menekankan keterbukaan, kebersamaan, toleransi, bahkan sejak dini.

Pendidikan multikultural merupakan wacana yang relatif baru di Indonesia, terlebih bagi pendidikan Islam di Indonesia, tapi sesungguhnya nilai-nilai pendidikan multikultural sudah menjadi wawasan dan kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Akar filosofis pendidikan multikultural di Indonesia tercover dalam semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika", implisit dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Noor, Supardi, & Haryanto, 2019). Dengan demikian pendidikan multikultural dapat dijadikan alternatif solusi untuk menjadi terapi bagi ketidakkompakan bangsa Indonesia menghadapi masalah bangsa ini secara bersama-sama, sehingga derap langkah kita semakin mantap menuju aktualisasi jati diri bangsa yang lebih merdeka cerdas dan bijak.

Menurut Tilaar (2004), dalam pendidikan multikultural tidak mengenal fanatisme/fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama. Setiap komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula, pendidikan multikultural tidak mengenal adanya xenophobia (kebencian terhadap

barang/orang asing). Istilah pendidikan multikultural-religius mengandung dua konsep pendidikan yang dipadukan, yaitu antara pendidikan multikultural dan pendidikan agama (Asrori, 2016). Pendidikan multikultural sebagai basis pendidikan yang menghargai kemajemukan budaya sedangkan pendidikan agama sebagai basis pendidikan yang bersumberkan pada nilai-nilai keagamaan untuk melahirkan manusia-manusia religius (Arifin, 2012). Perpaduan dua konsep pendidikan ini bertujuan untuk dapat membangun sistem pendidikan yang dapat mengintegrasikan dari keduanya atau mengurangi kelemahannya.

Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia, baik jalur pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui integrasi materi kurikulum, yang relevan, pendekatan, metode dan model pembelajaran yang mengedepankan paradigma keterbukaan, kebersamaan, toleransi dan saling menghormati berbagai perbedaan dan keragaman yang ada sebagai satu sunnatullah yang mesti berjalan (Hasudungan & Sartika, 2020).

Pendidikan sebagai basis nilai moral-spiritual harus dapat menjadi solusi terhadap munculnya dampak globalisasi (McKenzie, 2020). Konsep pendidikan multikultural-religius merupakan perpaduan antara konsep pendidikan multikultural yang menekankan sikap penghargaan terhadap keberagaman dengan konsep pendidikan agama yang menekankan sikap tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah. Perpaduan konsep ini diharapkan dapat memunculkan bentuk pendidikan yang dapat melahirkan manusia-manusia yang humanis dan religius.

SIMPULAN

Negara Indonesia adalah negara yang sangat multikultural baik berdasarkan keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Dalam hal pendidikan, Indonesia termasuk negara yang memiliki sistem pendidikan terbesar di dunia dengan jumlah pelajar sebanyak 24,33 juta orang pada tahun ajaran 2021/2022. Oleh karena itu, selalu ada potensi konflik yang berujung kekerasan bilamana tidak dapat dikelola dengan baik dan benar termasuk di lingkungan sekolah. Selain guru, kurikulum pendidikan sangat berperan dalam mencegah terjadi kekerasan di sekolah. Bahwa, kurikulum pendidikan multikultural baik secara teoritis maupun praktik baik telah terbukti menjadi cara yang tepat dan komprehensif dalam mencegah kekerasan berdasarkan SARA. Apalagi sistem pendidikan nasional Republik Indonesia memberikan ruang yang besar dalam pengembangan pendidikan multikultural. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Pembelajaran sejarah juga dapat menjadi contoh yang baik dan relevan dari sisi konten/materi dalam mendukung pendidikan multikultural di sekolah. Mengingat bahwa secara historis, bangsa Indonesia terbentuk dari keberagaman yang besar dan menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, multikultural adalah lahir dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2012). Pendidikan multikultural-religius untuk mewujudkan karakter peserta didik yang humanis-religius. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 89–103. <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.89-103>
- Asmara, Y. (2019). Pembelajaran Sejarah Menjadi Bermakna dengan Pendekatan Kontektual. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 105–120. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.940>
- Asrori, A. (2016). CONTEMPORARY RELIGIOUS EDUCATION MODEL ON THE CHALLENGE OF INDONESIAN MULTICULTURALISM. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 10(2), 261. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.261-284>
- Baginda, M. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Karakter pada Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10(2), 1–12. <https://doi.org/10.30984/jii.v10i2.593>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Dhanapala, R. M. (2021). Triangular Framework for Curriculum Development in the Education Sector. *OALib*, 08(06), 1–10. <https://doi.org/10.4236/oalib.1107490>
- Hadi, H. (2016). KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN SEKULER. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2), 390–409. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.304>
- Hastuti, N. H., & Supriyadi, A. (2020). MEMPERHATIKAN KARAKTERISTIK BUDAYA DALAM FENOMENA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/awpm.v4i2.3883>
- Hasudungan, A. N. (2020). PEACE EDUCATION BASED ON LOCAL WISDOM OF PELA GANDONG IN SOCIAL SCIENCE. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 3(2), 151–165. <https://doi.org/10.33019/berumpun.v3i2.36>
- Hasudungan, A. N. (2021). Penggunaan Buku Teks Sejarah Indonesia pada Satuan Pendidikan Menengah atas dalam Kurikulum 2013. *Journal Education and Learning*, 1(1), 12–19. Retrieved from <http://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/EL/article/view/11>
- Hasudungan, A. N., & Sartika, L. D. (2020). Model Pendidikan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal Pela Gandong Pada Pembelajaran IPS Pasca Rekonsiliasi Konflik Ambon. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 2(1), 20–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ijssse.v2i1.2658>
- Lukitaningsih, Hasudungan, A. N., & Nababan, S. A. (2022). MAMA PAPUA'S ROLE IN THE SOCIO-ECONOMIC SOCIETY: CASE STUDY OF THE DANI TRIBE IN JAYAWIJAYA REGENCY, PAPUA, INDONESIA. *Revista Direito e Sexualidade (RevDirSex)*, 3(1), 167–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.9771/revdirsex.v3i1.47693>
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber

- Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>
- Mahfudzi, M. (2020). Membangun Komunikasi Harmonis Berbasis Al-Qur'an. *Almarhalah / Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.36>
- Matsuroh, M. (2010). KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL. *Millah, ed(khus)*, 71–83. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art4>
- McKenzie, J. (2020). Globalization as a Context for Moral Development. In L. A. Jensen (Ed.), *The Oxford Handbook of Moral Development* (pp. 662–681). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190676049.013.38>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd Edition* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Noor, A. F., Supardi, A. R. K., & Haryanto, S. (2019). Multicultural Education Praxis for Primary Schools: Perspective of Muhammadiyah Primary Schools Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 23(4), 1039–1052. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V23I4/PR190432>
- Panasyuk, M., Pudovik, E., Malganova, I., & Butov, G. (2015). Historical Heritage Factor in Evaluating Development Prospects of the Regional Multicultural Community. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 188, 193–196. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.368>
- Pelu, M., Dardiri, A., & Zuchdi, D. (2016). PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 3(2), 198–212. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v3i2.9820>
- Prayogi, A. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(2), 240–254. <https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050>
- Pujiartati, R., & Sariyatun. (2017). History Learning Through Multicultural Approach as Strategy for Peace Education. *Proceedings Ictess Unisri 2017*, 1(1), 120–125. Surakarta: Slamet Riyadi University. Retrieved from <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/1422>
- Rulianto, R. (2019). Pendidikan Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 127–134. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16527>
- Rustam, I. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1), 129–154. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>
- Saiman, M. (2011). Inovasi Metode Pembelajaran Sejarah. *LENTERA (Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya, Dan Sosial)*, 4(2), 73–85. Retrieved from <https://lentera.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSBS/article/view/1616>
- Sato, S. (2010). Gatot Mangkupraja, PET A, and the origins of the Indonesian National Army. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 166(2–3), 189–217. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003616>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suniti. (2014). KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, 3(2), 23–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/edueksos.v3i2.354>

- Supardi. (2006). Pendidikan Sejarah Lokal Dalam Konteks Multikulturalisme. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, *0*(1), 117–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v0i1.395>
- Supriatin, A., & Nasution, A. R. (2017). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PRAKTIK PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *3*(1), 1. <https://doi.org/10.32332/elementary.v3i1.785>
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Widiatmaka, P., & Purwoko, A. A. (2017). Civic Education as a Vehicle to Build Student Tolerance Character. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, *5*(2), 171–186. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.02.8>
- Wirasari, & Bain, A. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Pada Mata Pelajaran Sejarah Terhadap Sikap Pluralis Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Pekalongan Tahun Pelajaran 2017/2018. *Indonesian Journal of History Education*, *6*(1), 76–88. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/27356>
- Zamroni, Z., Dwiningrum, S. I. A., Hope, J., Kartowagiran, B., Sudartinah, T., Siteine, A., & Yao, Z. (2021). Cross-Cultural Competence in Multicultural Education in Indonesian and New Zealand High Schools. *International Journal of Instruction*, *14*(3), 597–612. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14335a>
- Zulqarnain, Z. (2017). Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren D DI-AD Mangkoso Baru Sulawesi Selatan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, *1*(2), 193–205. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(2\).631](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).631)